



Ibadah Haji dan Kontribusinya Terhadap Berbagai Bidang Sosial Masyarakat di Indonesia (Tahun 1900-1945)

Eka Yudha Wibowo

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstract

The implementation of the pilgrimage in the mid-19th century experienced a significant increase. Various purposes and activities they do while in the holy land. For those who have high dedication to the fate of their people, they prefer to live there for several years and study various fields of religion and other sciences. For those who go straight home after performing the pilgrimage, of course it also has a psychological impact on themselves and gives a better understanding of Islam for others. Those who studied in the holy land in the 19th century generally had a purpose other than to be able to obtain sufficient knowledge there was also to seek support from various parties to expel invaders in Indonesia through the formation of Islamic organizations. This study is examined by looking at the contribution of the Hajj in various social fields that occur after performing the worship for the people in Indonesia.

Abstrak

Pelaksanaan ibadah haji pada pertengahan abad 19 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berbagai tujuan maupun kegiatan mereka lakukan sewaktu berada di tanah suci. Bagi mereka yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap nasib bangsanya lebih memilih untuk bermukim di sana untuk beberapa tahun dan mempelajari berbagai bidang ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Bagi mereka yang langsung pulang setelah menunaikan haji tentunya juga memberikan dampak psikologis bagi dirinya sendiri serta memberikan pemahaman lebih mengenai Islam bagi orang lain. Mereka yang belajar di tanah suci pada abad 19 umumnya mempunyai tujuan selain untuk dapat memperoleh ilmu yang cukup ada pula demi mencari dukungan dari berbagai pihak untuk mengusir penjajah di Indonesia melalui pembentukan organisasi-organisasi Islam. Kajian ini diteliti dengan melihat kontribusi ibadah Haji dalam berbagai bidang sosial yang terjadi setelah menunaikan ibadah tersebut bagi masyarakat di Indonesia.

Keywords: pilgrimage; hajj; history

DOI: 10.22515/shahih.v4i2.1875

Coressponding author

Email: yudha.uiteljik@gmail.com

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu peribadatan yang bisa dikatakan sebagai ibadah yang cukup penting dalam ajaran Islam. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, secara spiritual telah sempurna Islamnya. Islam memandang secara seimbang antara nilai materiil dengan nilai spritual, maka seseorang yang telah sempurna amal ibadah Islamnya dengan berhaji akan sempurna pula amal usaha keduniannya. Haji di wilayah Hindia Belanda termasuk ibadah yang diupayakan oleh sebagian besar kaum pribumi meski dipersulit pemerintah kolonial.

Pemerintahan Hindia Belanda menyatakan bahwa golongan fanatik dalam beragama salah satunya akibat dari ibadah haji yang dijalankan oleh pribumi. Langkah pertama dari pemerintah adalah mengeluarkan *ordonansi* (peraturan pemerintah) dan banyak peraturan lainnya untuk menghambat gerak umat Islam di Hindia Belanda dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Isi dari peraturan *ordonansi* yaitu larangan bagi seorang muslimin menunaikan ibadah ke Makkah jika tidak mempunyai pas jalan (Mursyidi, 1984, pp.12-13). Dalam hal ini, seorang penasehat urusan Hindia Belanda bernama C. Snouck Hurgronje berusaha memecahkan masalah antara kegiatan pelaksanaan ibadah haji dan fanatisme (Yatim, 1993, P.253). Menurutnya, posisi pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia tidak akan goyah akibat pelaksanaan haji yang dilakukan oleh para pribumi, namun satu hal yang perlu diwaspadai dan cukup berbahaya adalah keberadaan *koloni Jawa*, yakni pemukiman yang berada di Makkah tempat tinggal orang-orang yang berasal dari Indonesia. Dalam hal ini, para pribumi ini berhasil memunculkan kesadaran yang lebih tinggi mengenai persatuan umat Islam sedunia yang tercipta dikarenakan pergaulan hidup selama bertahun-tahun. Di Makkah selain kegiatan ibadah, mereka juga memperoleh banyak bacaan dan tulisan di tempat pendidikan agama yang di dalamnya terdapat usaha-usaha perjuangan yang bersinggungan dengan *Pan-Islamisme* (Noer, 1982, p.33). Dengan begitu haji dianggap cukup berbahaya, hingga muncul pandangan *hajiphobia* sebagai bagian dari *Islamophobia*. Adanya pandangan seperti itulah membuat Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghalangi pribumi yang hendak melaksanakan ibadah haji dengan cara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah (Putuhena, 2007, p.291).

Pemerintah Kolonial Belanda membebaskan masyarakat terkait persoalan *ubudiyah* dan *muamalah* serta mengizinkan para calon haji Indonesia untuk menumpang kapalnya, akan tetapi mengenai masalah politik akan mendapatkan tindakan tegas bahkan hukuman yang sangat berat (Ricklefs, 2005, p.353). Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan *Besluit* (keputusan) dengan Nomor 9 tertanggal 18 Oktober 1825 yang mewajibkan setiap calon haji yang akan melaksanakan ibadah ke Makkah harus membayar *reis pas* (pas jalan) sebanyak 110 golden dan bagi mereka yang tidak mempunyai pas jalan akan dikenakan

denda sebesar 1000 golden (Eisenberger, 1928, p.21). Mereka juga harus melampirkan bukti bahwa mereka mempunyai perekonomian yang kuat dalam hal keuangan sehingga mampu menjamin kecukupan keluarga yang mereka tinggalkan (Noer, 1982, p.33). Di samping itu, kepala daerah harus melakukan pengawasan haji terkait kegiatan yang mereka lakukan serta, membuat laporan perihal orang-orang yang berangkat dan pulang dari Makkah. Selanjutnya pada tahun 1902, banyak calon haji Indonesia menempuh perjalanan haji melalui Singapura, karena pada saat itu pihak kolonial Inggris tidak melarang mereka untuk ikut kapalnya menuju Jeddah (Noer, 1982, p.353).

Berbagai *ordonansi* (peraturan pemerintah) yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan penyelenggaraannya diatur dengan sangat terperinci oleh Pemerintah Kolonial dengan tujuan mengawasi, membatasi dan mempersulit pelaksanaan perjalanan haji ke Makkah. Diterbitkannya *Besluit* mempunyai tujuan utama yaitu agar semangat dari pribumi yang hendak naik haji menurun dan pembatasan jama'ah haji yang akan berangkat ke Makkah.

Menurut Aqib Suminto, bahwa saat wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan Pemerintah kolonial, kondisi politik umat Islam di dunia sedang dihangatkan oleh gerakan *Pan Islamisme* yang dipelopori oleh Jamaludin Al-Afghani salah satunya. Gerakan ini dianggap sebagai pembawa fanatisme beragama kepada umat Islam yang harus diawasi secara ketat oleh Pemerintah Hindia Belanda (Suminto, 1986, p.12).

Fanatisme beragama akan membawa pengaruh besar bagi perjuangan Bangsa Indonesia yang notabene menganut agama Islam. Masyarakat yang sudah kembali Makkah setelah menunaikan ibadah haji dianggap telah memiliki pengalaman spiritul yang luar biasa dan akan berpengaruh pada suatu politik haji.

Dalam buku-buku maupun penelitian mengenai ibadah Haji, peneliti menemukan banyak hal tentang pembahasan haji namun pembahasan yang terfokus mengenai pengaruh haji pada awal abad 20 yang direpresentasikan dengan munculnya organisasi politik Indonesia di masa depan serta kontribusinya terhadap bidang sosial masyarakat di Indonesia yang menjadi perhatian dari peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki kekhususan dibandingkan dari penelitian sebelumnya yaitu pengaruh ibadah haji terhadap sikap dan pemikiran politik, ekonomi dan pendidikan umat Islam Indonesia.

Hal ini menarik untuk dibahas, mengapa ibadah haji dapat berkontribusi cukup besar terhadap berbagai bidang sosial di Indonesia terutama bidang politik, bidang ekonomi dan bidang pendidikan. Kontribusi pertama dari ibadah haji yakni dalam bidang politik di Indonesia.

Bidang Politik

Islam dan politik memiliki hubungan yang erat dalam bentuk interelasi secara fungsional. Dalam bentuk hubungan yang demikian Islam berfungsi sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial umat manusia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara yang diawali oleh Portugis yang tiba di Maluku pada 1512 dan Belanda yang tiba di Banten pada 1598 telah menimbulkan realitas baru bagi hubungan Islam dan perpolitikan di Indonesia. Portugis yang baru saja lepas dari Perang Salib masuk ke Indonesia dengan watak politik dan militer, selain juga untuk kepentingan perdagangan dan agama (S. Putuhena, 2007, 261). Posisi umat Islam pada zaman kolonial Belanda lebih tepat disebut sebagai bagian masyarakat terjajah atau lawan penguasa yang harus selalu diwaspadai dan dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda.

Seiring dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, calon jamaah haji yang berasal dari wilayah Hindia Belanda mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya dan selalu memimpin dalam jumlah terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jumlah jamaah Haji dari wilayah Hindia Belanda pada tahun 1869 berjumlah 3442 jiwa, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1870 naik menjadi 3541 jiwa dan melonjak cukup tinggi menjadi 5360 jiwa pada tahun 1871 (Kolonial Verslag, 1865, p.14). Hal itu membuat penguasa kolonial menempatkan konsulnya di Jeddah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dengan ketat (Suminto, 1986, p.93).

Ibadah haji ini memberi dampak yang cukup penting bagi jamaah haji Indonesia karena selain belajar ilmu agama dari Timur Tengah juga menambah ilmu tentang perpolitikan untuk mengusir penjajah dari tanah airnya. Para jamaah haji ini pada awalnya yaitu abad XVII dan abad XVIII, belum berperan dalam perlawanan terhadap penjajah, kecuali Syekh Yusuf Makassar, yang sepulang dari Haramain ikut berperang di pihak Sultan Ageng melawan Sultan Haji yang dibantu Belanda (Putuhena, 2007, p.262).

Pada akhir abad ke 19 ini, seperti yang diungkapkan di atas, jamaah haji terbesar dan paling aktif di Makkah berasal dari Indonesia dan pada kelanjutannya berpengaruh sebagai cikal bakal bagi perjuangan bangsa untuk melawan penjajah Belanda. Bahkan di Makkah sudah terdapat semacam yayasan agama yang menampung santri-santri dari Indonesia untuk dapat membentuk solidaritas serta menjadi tempat untuk menempa ilmu-ilmu baru dari Timur Tengah khususnya tentang *Pan Islamisme*. Oleh karena itu, dikarenakan faktor kepentingan ideologi imperialisme dan reaksi ketakutan dari Belanda akan kemampuan dari orang-orang yang sekembali dari Makkah, maka Belanda menempatkan konsulnya untuk meneliti kegiatan orang-orang yang berhaji di sana (Suminto, 1986, p.93).

Dari hasil analisis Snouck Hurgronje dia berkesimpulan bahwa di kota Makkah terletak jantung kehidupan agama Islam penduduk Nusantara, yang setiap detik mengalirkan darah

segar ke seluruh bagian tubuh umat muslim di Hindia Belanda. Di tanah suci ini pula mukmin Indonesia bertemu dengan lingkungan Islam Internasional yaitu *Pan Islamisme* (Suminto, 1986, p.95).

Akan tetapi menurut Snouck, ibadah haji tidak perlu dilarang. Baginya apabila mengatakan bahwa orang Islam yang telah menunaikan ibadah haji akan menjadi agitator adalah pendapat yang keliru. Kenyataan menunjukkan puluhan ribu rakyat pribumi yang telah menunaikan ibadah haji tetap bersifat baik terhadap pemerintah. Banyak dari para haji ini sepulang dari Makkah mereka berpakaian seperti orang Arab dan menggunakan nama Arab untuk mengganti nama lokal mereka, namun mereka tetaplah sama seperti saat mereka memulai melakukan perjalanan sebelumnya, masih tetap bodoh atau pintar, fanatik atau toleran (Suminto, 1986, p.96).

Dalam pelaksanaan ibadah haji Snouck melihat perbedaan yang cukup jauh antara mereka yang hanya beberapa bulan tinggal di Makkah, dengan beberapa *mukimin* (mereka yang telah tinggal menahun di Makkah) yang mempelajari dan menguatkan ilmu agama. Pernyataan ini mengundang kesan bahwa pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jamaah. Padahal dalam menggambarkan keadaan kota Makkah dengan mukminnya Snouck berpendapat bahwa kota ini seperti jantung bagi kehidupan Islam di Indonesia, karena jamaah haji ketika di tanah suci banyak berhubungan dengan muslim dari berbagai tempat. Orang pribumi berjubel-jubel seperti ikan teri berlayar pulang pergi ke Jeddah, yang di tanah Arab diseret berbondong-bondong oleh petunjuk-petunjuk jalan calon haji ke tempat-tempat yang dianggap keramat (Hurgronje, 1973, p.27).

Walaupun keinginan untuk melakukan perjalanan haji sangat kuat, pemahaman keagamaan juga masih sangat terbatas. Kehidupan keberagaman masih bersifat sinkretis antara unsur Islam, Budha maupun Hindu. Di Jawa masyarakatnya masih memiliki corak kehidupan yang erat dengan mitos dan ketahayulan.

Sejak awal penduduk lokal di kawasan Hindia Belanda lebih tertarik hal yang berbau mistik daripada syariat Islam. Kegiatan yang dekat dengan mistik lebih mereka utamakan daripada melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Hal ini terjadi akibat masih kuatnya pengaruh Hindu terkait dinamika kehidupan masyarakat pribumi. Banyak penduduk pribumi yang beragama Islam namun tidak melaksanakan kewajiban dalam peribadatan Islam seperti halnya puasa dan sembahyang serta mengabaikan berbagai syariat Islam lainnya. Meski begitu, penduduk muslim di wilayah Hindia Belanda memandang keyakinan beragamanya sebagai media kuat pemersatu umat yang membedakan dirinya dari orang lain (Suminto, 1986, p.12).

Snouck menyatakan bahwa pada awal abad ke-19, penduduk muslim di wilayahnya hanya nampak di permukaan saja memeluk Islam, ibarat sedang mengenakan selimut kain yang berlubang besar sehingga nampak keaslian di dalamnya, termasuk ibadah haji.

Ada dua aspek negatif mengenai para haji yang berasal dari pandangan Pemerintah Kolonial Belanda. *Pertama*, para haji dianggap sebagai orang suci yang membuat warga biasa kemudian menganggap mereka sebagai orang sakti dan mempunyai kekuatan gaib. Penguasa Kolonial terkadang mengklasifikasikan orang yang sudah kembali dari Makkah sebagai suatu “golongan pendeta” yang secara sosial peranan mereka yakni melakukan ritual keagamaan dan menghabiskan waktu dengan berbagai ibadah (Douwes & Kaptein, 1997, P.8). *Kedua*, adanya unsur politik, para haji dianggap memberikan pengaruh politik dan berkontribusi sebagai provokator dan memimpin gerakan perlawanan untuk melawan pemerintah Kolonial (Steenbrink, 1984, p.235).

Sebagian besar mereka yang sudah kembali dari ibadah haji tidak terpengaruh gerakan fanatik umat Islam di Makkah, oleh karena itu sejak awal mula kedatangannya di Hindia Belanda, Snouck telah berusaha memberikan penjelasan kepada pejabat kolonial yang berwenang, bahwa para haji ini tidak perlu diawasi secara berlebihan. Salah satu cara mendudukkan masalah haji tersebut dengan menghambatnya secara halus dan tidak langsung yaitu dengan mengalirkan semangat pribumi ke arah lain (Suminto, 1986, p.96).

Reaksi Belanda tersebut dijadikan sebagai moment oleh ulama Indonesia untuk membentuk berbagai organisasi Islam maupun melakukan berbagai serangan yang menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengusir penjajah Belanda. Pada tahun 1803, tiga orang ulama Minangkabau yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang pulang dari menunaikan ibadah haji. Mereka berupaya untuk melakukan pembersihan praktek keagamaan yang berkaitan dengan kepercayaan lokal dinamisme ataupun animisme, seperti halnya yang pernah dicontohkan oleh kaum Wahabi di Makkah. Mereka memandang bahwa kaum Wahabi dengan gerakannya pemurnian Islam mampu membersihkan praktek keagamaan yang bertentangan Islam. Mereka turut serta membawa pemikiran baru tentang pemurnian Islam di tanah suci dan menerapkannya di wilayah Minangkabau.

Gerakan yang mereka pelopori kemudian dikenal dengan Gerakan Padri. Gerakan Padri pada awalnya bertujuan untuk menghilangkan adat kebiasaan masyarakat lokal yang bertentangan dengan agama Islam seperti berjudi, sabung ayam, menggunakan candu dan minum-minuman keras. Para penghulu lokal pun tidak tinggal diam untuk mempertahankan adat yang sudah mereka jalankan selama ratusan tahun dirusak oleh para haji tersebut. Merasa kondisi mereka terjepit, para penghulu ini lantas meminta pertolongan kepada Pemerintah Kolonial dan meletuslah perang Padri pada tahun 1821-1832 (Ricklefs, 2008 p.215).

Di pulau Jawa tepatnya di wilayah Yogyakarta terjadi perang Diponegoro (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Meskipun Diponegoro belum pernah melaksanakan ibadah haji, namun orang yang menjadi penasehatnya adalah ulama atau kyai

yang pernah melaksanakan haji. Pangeran Diponegoro yang merasa kecewa karena haknya untuk menjadi sultan Yogyakarta telah dirampas, melakukan perlawanan terhadap penguasa Yogyakarta yang bertindak tidak adil dengan berencana membuat jalan menerobos tanah miliknya dan makam yang berada di bawahnya. Saat itu ia memperoleh pertolongan dari kalangan santri yaitu Kyai Madja dan menganggap perlawanannya itu sebagai perang suci melawan orang kafir Belanda. Mereka memandang bahwa penguasa Yogyakarta telah melakukan penyimpangan agama, termasuk bekerja sama dengan Belanda yang mereka anggap kafir itu.

Para ulama di Aceh yang telah lama tinggal di Makkah dan pulang ke Aceh turut berkontribusi dalam perang Sabil (1873-1912). Para haji yang terlibat dalam perang ini menyatakan perlawanan dalam upayanya menentang agresi Belanda ke Serambi Makkah. Selain itu karena agresi ini dilakukan oleh Belanda yang kafir dan pantas dijawab dengan perang atas nama agama.

Ada juga pemberontakan yang dilakukan di Cilegon pada 1888 (M. S. Putuhena, 2007, p.263). Peranan para haji dalam pemberontakan ini sangat menonjol. Para haji tercatat sebagai pemimpin yang merencanakan dan memantapkan situasi, seperti Haji Abdul Karim, Haji Marjuki, Haji Tubagus Ismail dan Haji Wasid. Dua ulama yang disebutkan merupakan pemimpin langsung pemberontakan. Pemimpin pasukan pada umumnya dan sebagian anak buah mereka terdiri dari para haji (Putuhena, 2007, p.265). Selain bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh para ulama melawan penjajah ada juga yang kemudian membentuk organisasi politik (Abdullah & Hisyam, 2003, p.158).

Dari kepemimpinan yang dilakukan oleh para ulama haji atau elit agama, ada hal-hal yang cukup menarik yaitu *pertama* para ulama memiliki kesamaan persepsi bahwa Belanda adalah pemerintahan yang kafir sehingga perlu diperangi dan tidak layak untuk memimpin umat muslim di Nusantara. *Kedua*, penduduk lokal yang bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial disebut dengan kafir. *Ketiga*, para elit agama memobilisasi kekuatan untuk melawan pemerintah Belanda dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan (Putuhena, 2007, p.266). Dari persepsi tersebut lahirlah ide-ide pemikiran yang mengarah pada persatuan dan kesatuan dalam melawan hegemoni kekuatan penjajah serta upaya untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam aspek perjuangan bangsa.

Meskipun demikian pada awalnya elit agama abad ke XIX belum memandang Islam sebagai ideologi politik untuk menggapai tujuan dan menata kekuatan politik. Mereka masih melihat pemerintah kolonial dengan pendekatan tekstual yaitu *syariah* dan *aqidah*. Pandangan tersebut kemudian bergeser pada abad XX bahwa ideologi Islam kemudian menjadi basis kekuatan dalam melawan penjajah Belanda dengan mempersatukan persepsi di antara umat Islam di Indonesia, agar melawan kolonial penjajah dengan bentuk-bentuk organisasi Islam (Putuhena, 2007, pp.266-2367).

Bidang Ekonomi

Perkembangan ekonomi rakyat pada masa liberal ditandai dengan munculnya buruh tani, petani pemilik lahan dan pedagang antara (Putuhena, 2007, p.334). Kondisi demikian tampaknya hingga memasuki masa Politik Etis awal abad 20. Tujuan Politik Etis adalah untuk membayar hutang bagi rakyat Hindia Belanda dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun tidak berhasil. Walaupun terjadi kemajuan yang berarti dalam bidang industri agraris, pertambangan dan pengangkutan namun di lain pihak, tanah dan tenaga rakyat dibayar dengan harga murah (Kartodirdjo, 1977, p.60).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh rakyat yang ingin melaksanakan ibadah haji adalah kerja keras dan hemat meski tenaga mereka seringkali dibayar dengan murah. Sebagian besar jamaah haji di wilayah Hindia Belanda yang berangkat setiap tahun ke tanah suci sebenarnya belum mempunyai bekal materi yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji yang demikian ini disebut “haji miskin” oleh orang Arab di Hijaz (Putuhena, 2007 p.336). Adanya daya tarik haji yang kuat, seakan-akan mendorong mereka untuk memaksakan diri pergi ke Mekkah, meskipun biaya yang dibutuhkan kurang memadai.

Banyak di antara dari jamaah haji yang sebelum berangkat ke tanah suci, mereka mencari bekal dengan menjadi buruh perkebunan karet dan kelapa sawit di Singapura. Calon jamaah haji ini menumpang kapal dagang untuk sampai ke Singapura. Para calon jamaah haji ini terdorong untuk melakukan pekerjaan ini agar mereka dapat mengumpulkan bekal yang cukup untuk berangkat haji. Akan tetapi banyak dari mereka yang meninggalkan pekerjaan itu setelah menunaikan ibadah haji. Ketika kembali ke kampung halaman, mereka telah membawa berbagai pengalaman dan pengetahuan sebagai buruh perkebunan tentang menanam kelapa sawit dan karet. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang haji inilah yang memperkenalkan penanaman karet di Sumatera dan Kalimantan (Putuhena, 2007 p.337). Penanaman karet dan kelapa sawit merupakan salah satu fungsi ekonomi terpenting dari haji.

Bagi para haji yang tidak mempunyai bakat ataupun lingkungan perekonomian yang kurang mendukung dan memadai, ia akan tetap pada pekerjaan sebelumnya sebagai seorang peternak, nelayan maupun petani. Sebagian haji tinggal di daerah kepulauan terpencil dan yang tidak memiliki lahan untuk pertanian dan perkebunan maka akan beralih mejadi pedagang eceran yang menjual barang-barang untuk konsumen lokal. Haji yang sebelumnya berprofesi sebagai petani pemilik tanah, namun kemudian tanahnya dijual untuk biaya perjalanan haji, setelah kembali ia akan berdagang sebagai pedagang eceran (Putuhena, 2007 p.338).

Seorang haji yang tiba ke tanah air setelah melakukan ibadah di Makkah akan berusaha supaya anggota keluarga yang lain dan keluarganya sendiri bisa melaksanakan haji suatu

saat nanti. Oleh karena itu, usaha mereka tidak berhenti sampai di sini. Mereka berusaha mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dan menggunakannya dengan hemat sehingga ia bisa menabung.

Banyak dari calon haji yang pada awalnya jarang untuk menabung, kemudian mereka menyisihkan sebagian uangnya sedikit demi sedikit hingga perjalanan yang sudah lama mereka idam-idamkan dan yang akan memberikan tempat di mata masyarakat untuk selama sisa hidupnya bisa tercapai (Hurgronje, 1973, p.111). Dari hasil usaha kegiatan perekonomian yang sebenarnya belum memuaskan tersebut, mereka akan menabung sampai beberapa tahun untuk biaya mereka naik haji. Pada akhirnya mereka menjadi sebuah golongan baru dan terjadi perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat desa. Haji telah menciptakan sebuah etos bagi umat Islam yaitu kerja keras dan hemat, perubahan budaya ekonomi dari jasa ke uang, menciptakan lapangan pekerjaan serta pengenalan transaksi ekonomi antar daerah.

Adanya dorongan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji telah menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dikarenakan ingin mencapai tujuan tersebut. Mereka akan meningkatkan usaha perekonomiannya dengan semangat kerja keras hingga tujuannya tercapai. Para haji memiliki penghasilan dari berbagai sumber perekonomian seperti pemilikan tanah, beternak, dan berdagang yang merupakan sumber utama dari pendapatan mereka. Dalam hal keagamaan mereka juga mengembangkan usahanya dengan mengajar di madrasah-madrasah keagamaan yang juga merupakan sumber penghasilan penting (Kartodirjo, 1984, pp.85-86).

Para haji ini mempunyai tugas resmi yang harus mereka tanggung yaitu harus bisa menjadi penasehat kerohanian ataupun spiritual. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kewibawaannya dalam masyarakat. Dengan usaha ini mereka berharap mendapatkan kesuksesan yang lebih banyak dalam hal ibadah dan kegiatan sosial. Dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka cenderung bersikap untuk lebih efisien dalam penambahan modal usaha, dengan alasan untuk pengembangan usaha dan keinginan hidup yang lebih baik. Sebagian besar haji mempunyai tanah sehingga mampu membuat mereka mandiri di bidang ekonomi, selain itu mereka juga memberikan pengaruh atas golongan orang yang bergantung kepada orang lain dalam hal ekonomi. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh kaum haji dan pemilikan atas tanah telah meningkatkan kedudukan mereka di lingkungan tempat mereka tinggal.

Sebagian dari haji mengembangkan usaha peminjaman uang kepada mereka yang membutuhkan, tentunya disertai dengan bunga. Haji yang bergerak di bidang ini mengikuti sebagian syaikh di Makkah yang biasa meminjamkan uangnya untuk jamaah haji (Putuhena, 2007, p.338).

Pengeluaran biaya perjalanan haji yang begitu banyak memunculkan dugaan bagi seseorang yang telah kembali dari Tanah Suci bahwa mereka akan menjadi miskin dan hidup kekurangan. Sebagian kecil dari mereka memang tidak meningkat secara ekonomi, namun tidak sampai jatuh miskin. Para haji ini meyakini bahwa setiap hasil usaha yang mereka lakukan sebelum melaksanakan haji merupakan amalan yang baik. Secara ekonomi, pelaksanaan ibadah haji memang membuat harta berkurang. Akan tetapi ada keyakinan kolektif di antara kaum muslimin bahwa menurut agama, harta itu tidak sekedar memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi lebih pada kepuasan memanfaatkan harta yang digunakan untuk kepentingan ibadah (Putuhena, 2007, p.339).

Pada waktu itu terdapat sebuah kenyataan bahwa seorang muslim yang mempunyai harta lebih untuk kebutuhan sehari-hari, maka harta tersebut akan digunakan untuk berangkat Haji. Naik haji dijadikan sebuah motivasi untuk bekerja keras dan bersikap hemat. Ibadah haji telah mempengaruhi kemajuan ekonomi dari pihak-pihak yang berhubungan dengan Haji. Keuntungan besar diperoleh oleh pihak terkait seperti pedagang perantara, perusahaan pelayaran serta pemerintahan.

Pedagang perantara merupakan pembeli dari hasil pertanian dan perkebunan dari para calon haji untuk diedarkan ataupun dijual kembali kepada pedagang besar. Sebagian besar calon haji memperoleh biaya perjalanan haji dari penjualan hasil pertanian maupun perkebunan. Pada periode ini pula telah muncul sistem *ijon*. Petani yang hasil pertaniannya tidak mencukupi sebagai biaya perjalanan haji akan meminjam uang kepada pedagang perantara. Petani yang meminjam diwajibkan mengembalikan uang tersebut pada musim panen yang akan datang, tentunya dengan disertai bunga. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh pedagang perantara jauh lebih sedikit daripada perusahaan pelayaran yang mengangkut jamaah haji.

Perjalanan haji dari kepulauan Nusantara menuju ke tanah suci telah mempengaruhi berdirinya beberapa perusahaan pelayaran yang khusus mengangkut calon jamaah haji. Perusahaan pelayaran untuk pengangkutan jamaah haji dari Hindia Belanda dimulai pada tahun 1825 yang dilakukan oleh Syaikh Umar Bugis, pedagang Arab yang memiliki perusahaan pelayaran (Putuhena, 2007 p.134).

Pada tahun 1874, pengangkutan jamaah haji juga diramaikan oleh perusahaan pelayaran milik pemerintahan Inggris dengan pelabuhan embarkasi Singapura. Melihat Inggris dan pedagang Arab yang meraup keuntungan besar dari bisnis pelayaran ini, Belanda yang sebelumnya enggan untuk mengurus masalah pengangkutan haji pada akhirnya mendirikan tiga perusahaan pengangkutan jamaah haji. Tiga perusahaan tersebut adalah Nederland, Rotterdamsche Llyod, dan Ocean Maatschappij (Putuhena, 2007 p.324).

Ketiga perusahaan tersebut dikenal dengan *Kongsi Tiga* yang memegang hak monopoli penuh terhadap pengangkutan jamaah haji di Hindia Belanda. Selain hak monopoli, kewajiban jamaah haji untuk membeli tiket pergi-pulang juga memberikan keuntungan bagi perusahaan pelayaran Belanda. Keharusan membeli tiket pergi-pulang ini telah menyebabkan sebagian besar jamaah haji dari Jawa, Sumatera dan Kalimantan lebih memilih untuk berangkat dari Singapura karena harga tiket jauh lebih murah.

Pemerintah kolonial dan perusahaan pelayaran merupakan pihak yang sangat diuntungkan karena berada di posisi sebagai penjual jasa di bidang transportasi laut sementara umat Islam tidak lebih dari sekedar konsumen pembeli atau pengguna jasa tersebut. Selain itu pemerintah Belanda juga kembali meraup keuntungan besar dari para jamaah haji yaitu dengan memberikan jasanya berupa *pas-jalan* dan *visa* sehingga kas pemerintahan semakin terisi. Sejumlah jamaah haji yang ingin mengambil *pas-jalan* baik di Hindia Belanda maupun di konsulat di Jeddah harus membayar sejumlah uang tertentu.

Sejak tahun 1810, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang mengekang umat Islam yang ingin mengadakan perjalanan haji. Belanda menciptakan rintangan guna menghambat proses perjalanan haji yaitu para calon calon haji yang akan melaksanakan ibadah ke Makkah harus membayar pas jalan (*reis pas*) sebanyak 110 golden dan bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki pas jalan akan dikenakan denda sebesar 1000 gulden.

Bidang Pendidikan

Sebagian dari jamaah haji yang sudah selesai melaksanakan haji, memilih untuk tinggal di Makkah untuk beberapa tahun lamanya dengan tujuan menuntut ilmu dan mereka disebut sebagai *mukimin*. Para mukimin ini oleh penduduk setempat disebut *Jawah* atau *Jawi* (orang Jawa) yang bentuk jamaknya *Jawwiyin* (orang-orang Jawa). Jumlah mukimin semakin banyak dikarenakan setiap musim haji banyak jamaah yang menetap di Makkah. Para mukimin Indonesia di Makkah terdiri atas pelajar. Sebagian kecil di antara mereka bekerja sebagai syaikh haji, pedagang, penjahit, dan pembantu syaikh. Adapun sebagian dari mukimin yang terdiri dari pelajar membawa pulang ilmu dan pengalaman mereka ke tanah air untuk dijadikan bekal pendidikan untuk umat.

Di Hindia Belanda pendidikan keagamaan telah lama berlangsung seiring terbentuknya pusat-pusat penyebaran Islam. Pendidikan keagamaan pada masa awal pembentukan komunitas muslim nusantara (XIII-XVII) masih sederhana. Pada abad XVII dan XIX, pendidikan keagamaan berkembang dengan pesat seiring dengan munculnya tarekat. Tarekat yang berkembang luas di Hindia Belanda pada waktu itu adalah Naqsyabandiyah, Syatariyah, Qadryah. Tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiryah disebarkan oleh para haji yang telah kembali dari Makkah.

Pada awal abad ke XX, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan agama di Hindia Belanda. Perubahan ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan seperti di Mesir dan Hijaz yang diperkenalkan oleh sebagian haji yang telah pulang ke tanah air setelah menyelesaikan pendidikan di Mesir dan Hijaz. Para haji ini memainkan peranan yang cukup penting dalam menyebarkan pendidikan keagamaan di Hindia Belanda.

Di Padang Panjang, Sumatra Barat pada 1907 didirikan sebuah sekolah yang bernama Adabiyah School/ Madrasah Adabiyah (sekolah peradaban). Sekolah ini didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad, seorang pedagang tekstil yang pernah tinggal di Makkah selama empat tahun (1895-1999) (Noer, 1982, p.46). Madrasah ini didirikan atas usul dari teman studi Haji Abdullah Ahmad di Kairo dan Mekkah yaitu Thaher Jallaludin yang bertemu dengannya di Singapura tahun 1906.

Madrasah ini bertujuan untuk mencetak generasi muslim yang terpelajar, tidak *bertaqlid* dan *bid'ah* serta berijtihad dengan berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Di madrasah ini juga diberikan pelajaran berhitung, pengetahuan membaca dan menulis. Madrasah Adabiyah mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda pada tahun 1916 dan beberapa guru dari Belanda juga dipekerjakan di madrasah ini. Madrasah berkembang dengan pesat dan mendapat subsidi dari pemerintah.

Selain itu di Padang juga terdapat Surau Jembatan Besi, yaitu sekolah yang memberikan pelajaran agama dengan cara-cara tradisional. Fiqh dan tafsir Qur'an merupakan pelajaran utama di sekolah ini. Ketika Haji Rasul (Syaiikh Abdul Karim Amrullah) dan Haji Abdullah Ahmad masuk ke sekolah ini pada 1904, mata pelajaran yang cukup penting diajarkan adalah pelajaran kemampuan berbahasa Arab dan cabang-cabangnya (Noer, 1982, p.52). Haji Rasul pernah tinggal dan studi di Makkah selama beberapa tahun sebelum ia mengajar di Surau Jembatan Besi.

Pada tahun 1918, Zainuddin Labai dan Jalaluddin Thaib, yang juga teman dari Haji Rosul mendirikan Sumatra Thawalib. Beberapa madrasah yang dibangun oleh Kaum Muda juga diberikan nama Sumatra Thawalib. Kaum Muda adalah sebutan untuk para tokoh muda seperti Haji Rasul, M Jamil Djambek merupakan golongan yang menentang heterodoksi *bid'ah*, *taqlid* serta mengutamakan ijtihad dan akal Madrasah-madrasah ini dibangun dengan tujuan untuk melanjutkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan.

Di Yogyakarta terdapat tokoh yang berkontribusi dalam perubahan pendidikan dan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia yaitu Ahmad Dahlan. Ia juga tercatat sebagai seorang haji dan tinggal selama beberapa lama di Makkah untuk melanjutkan studinya pada tahun 1883. Sekembalinya dari Makkah ia diangkat menjadi khatib pada Masjid Kasultanan menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ahmad Dahlan juga pernah mendirikan sekolah di kraton Yogyakarta dengan pengantar bahasa Arab, namun

usaha ini tidak berhasil. Pada 1 Desember 1911, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang berdasarkan sistem pemerintah Belanda. Di sekolah ini ia mengajar pelajaran agama, sedangkan untuk mata pelajaran sekuler diajar oleh beberapa guru pribumi (Putuhena, 2007 p.370).

Ahmad Dahlan juga termasuk anggota dari organisasi Budi Utomo dan Sarekat Islam. Dari pengalaman berorganisasi inilah kemudian ia mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk mengajarkan pendidikan Islam di kalangan penduduk lokal wilayah Yogyakarta dan bertujuan untuk memajukan kehidupan keagamaan untuk bagi para pengikutnya.

Di Majalengka juga diperkenalkan sebuah model pendidikan keagamaan yang baru oleh Abdulhalim. Pada tahun 1909, ia menunaikan ibadah haji di Makkah dan kemudian melanjutkan studi keagamaan di sana selama dua tahun. Abdulhalim satu angkatan dengan Ahmad Dahlan pada waktu mereka belajar bersama kepada Syeik Ahmad Khatib. Setelah kembali ke tanah air, Abdulhalim mendirikan sebuah organisasi Hayatul Qulub (Kehidupan Hati) yang bergerak dalam bidang pendidikan agama. Organisasi ini juga mendirikan pesantren dan usaha perekonomian semacam unit kredit. Pesantren yang ia dirikan diterapkan sistem klasikal dengan lama studi selama lima tahun. Untuk kelas yang paling tinggi juga diajarkan tentang bahasa Arab.

Di Indonesia Timur sampai dekade ketiga abad XX, kegiatan keagamaan seperti mengaji (membaca al-Quran) masih dilakukan dengan cara tradisional berupa pengajian dan pembacaan kitab pada seorang ulama. Di pulau Salome wilayah dari Pangkajene Sulawesi terdapat sebuah pesantren yang mengajarkan cara pendidikannya dengan cara yang unik. Beberapa haji yang telah kembali dari belajar di Makkah membuka pengajian menurut keahliannya di rumah masing-masing. Para santri yang tinggal di suatu pondokan khusus secara bergilir mendatangi para guru untuk membaca kitab yang telah ditentukan.

Dari beberapa organisasi dan madrasah yang telah diketengahkan, terlihat adanya pengaruh yang begitu besar dari para ulama dan haji yang pernah menuntut ilmu di Makkah dan Mesir. Mereka mengembangkan pendidikan keagamaan yang banyak diadopsi dari Timur Tengah kemudian mereka terapkan di tanah air. Pembaruan pendidikan keagamaan tersebut ikut memajukan sistem pendidikan di Indonesia untuk ke depannya.

Kesimpulan

Ibadah Haji pada awal abad ke XX telah memunculkan sikap dan pemikiran politik masyarakat jajahan yang berdampak pada kebijakan Pemerintah Belanda. Pihak pemerintah yang awalnya melarang praktek ibadah haji kemudian mulai lunak dan tetap waspada terhadap para pelaku haji di Nusantara. Para santri dan pelajar yang pulang ke tanah air

sebagian besar membawa berbagai pemikiran politik yang didapatkan dari studi di tanah suci dan juga Mesir, yang cukup berpengaruh dalam perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Mereka memobilisasi massa serta menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menentang pihak kolonial. Haji juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap munculnya perkembangan pendidikan dan perekonomian. Dalam bidang ekonomi, haji turut memajukan perkembangan ekonomi rakyat pedesaan melalui etos kerja dan hemat. Pada umumnya orang haji menekuni pekerjaan sebagai petani pemilik, pedagang perantara dan pengusaha. Selain itu haji telah mendorong pertumbuhan dan mendatangkan keuntungan pada perusahaan industri jasa transportasi laut Belanda dari jasa pengangkutan haji.

Dalam bidang pendidikan peran serta haji telah memperkenalkan tentang berbagai macam pendidikan keagamaan. Dari model pendidikan yang menggunakan sistem klasikal maupun model pendidikan modern yang berbau sekolah Barat. Para haji ini yang dulu pernah studi di Kairo, ketika pulang mereka kemudian mendirikan bentuk sekolah madrasah yang waktu itu termasuk ke dalam pendidikan modern, yang mengikuti perkembangan di Kairo.

Referensi

- Abdullah, T., & Hisyam, M. (2003). *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: MUI.
- Douwes, D., & Kaptein, N. (1997). *Indonesia dan Haji*. (S. Soekarno, Ed.). Jakarta: INIS.
- Eisenberger, J. (1928). *Indie and de Bedevaart naar Mekka*. Rijksuniversitet Leiden.
- Hurgronje, S. (1973). *Islam di Hindia Belanda*. (S. Gunawan, Ed.). Jakarta: Bahrataraya Karya Aksara.
- Kartodirdjo, S. (1977). *Sejarah Nasional Indonesia Jld IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kolonial Verslag. (1865). *Pelgrims Verslag 1899*.
- Mursyidi, M. S. (1984). *Lintasan Sejarah Jamaah Haji Indonesia*. Jakarta: MARS-26.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1941*. Jakarta: LP3ES.
- Putuhena, M. S. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Ricklefs. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Steenbrink, K. A. (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suminto, A. (1986). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Yatim, B. (1993). *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT Raja Grafindo.